

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Incuk Rangga, Amin Dara, 2020 Edisi 3 Perpajakan, Konsep, aplikasi, contoh dan studi kasus.
diakses pada 3 juni 2024 pukul 14.45.
- Fitria (2024) Pajak Hiburan, jenis tarif dan contoh perhitungan,
<https://klikpajak.id/blog/jenis-pajak-hiburan/>
- Hamida, Junaidi dkk, 2023 “Perpajakan”. Batam
https://books.google.co.id/books?id=RRe2EAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Moh, Taufik 2022, Perpajakan
- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- Peraturan Daerah Kota Jambi Noor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Jambi.
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah mengharuskan semua satuan kerja perangkat daerah berubah menjadi organisasi perangkat daerah.
- Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja.
- Siti Kurnia Rahayu. 2020 Perpajakan, konsep, sistem dan implementasi edisi revisi
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2019
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Jambi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 42 ayat (2) tentang pajak daerah dan retribusi daerah.